

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islamisme merupakan ideologi yang memperjuangkan ajaran agama Islam sebagai hukum yang mestinya diterapkan dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, para penganut paham Islamisme selalu berupaya untuk menjadikan ajaran agama Islam sebagai dasar/ideologi suatu negara, di mana hukum dalam pemerintahan negara harus berlandaskan pada ajaran agama yang dianggap sebagai kebenaran sejati/mutlak. Upaya menjadikan ajaran Islam menjadi landasan hukum negara ditempuh dengan sarana yang legal maupun pemaksaan atau kekerasan terhadap kaum Islam non-radikal dan masyarakat non-Islam.¹

Dimensi pergerakan Islamisme yang diyakini sebagai solusi pembawa kebenaran mutlak, merupakan gambaran tentang upaya merealisasikan kembali sistem pemerintahan seperti pada zaman nabi Muhammad SAW di Madinah ke dalam suatu negara pada masa kini. Hal ini berlandaskan keyakinan akan praktik Islam yang dianggap paling benar, bebas dari pengaruh kebudayaan Barat, bersifat mutlak dan menyelamatkan, serta berasal dari Tuhan dan tanpa adanya campur tangan manusia.² Gerakan ini yang oleh Bassan Tibi disebut sebagai Islamisme. Baginya, Islamisme lebih dekat dalam menjelaskan upaya atau proses terbentuknya ideologi politik berlandaskan ajaran agama yang dianggap sebagai kebenaran sejati atau kebenaran mutlak.³ Artinya bahwa Islamisme lahir sebagai ideologi yang menentang atau menolak pluralitas dalam kehidupan masyarakat dunia. Sebab bagi mereka, kebenaran hanya terletak di dalam hukum dan ajaran Islam, yang mestinya dianut dan ditaati sebagai dasar dan pegangan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Lahirnya ideologi Islamisme, tentu tidak terlepas dari dua tokoh Islam Mesir, Hassan al-Banna dan Sayyid Qutb. *Pertama*, gerakan Islamisme diawali

¹ Mathias Daven, "Memahami Pemikiran Ideologis dalam Islamisme Radikal", *Jurnal Ledalero*, 17:7 (Ledalero, Juni 2018), hlm. 29-30.

² Siti Mahmudah, "Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Aqlam*, 3:1 (Lampung: Juni, 2018), hlm. 2.

³ Mathias Daven "Politik Atas Nama Allah" dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger (ed.), *Hidup sebuah Pertanyaan. Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2019), 98.

dengan perjuangan melawan hegemoni Barat di Mesir dan wilayah-wilayah peradaban Barat. Perlawanan tersebut ditandai dengan didirikannya organisasi radikal *Ikhwanul Muslimin* oleh Hassan al-Banna pada tahun 1928.⁴ Intensi Hassan al-Banna ketika mendirikan organisasi *Ikhwanul Muslimin* yaitu, membebaskan dan mengembalikan umat muslim yang sudah terpengaruh dengan peradaban Barat, di mana sekularisme telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat di Mesir, dan hal itu dipandang sebagai penyimpangan umat Islam dari ajaran yang benar, sebab pengaruh peradaban Barat telah menjauhkan umat muslim dari identitas otentik mereka sebagai penganut Islam yang sejati, sehingga melalui *Ikhwal Muslimin*, Hassan al-Banna dan kawan-kawan sungguh merangsek masuk ke segala aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, pendidikan maupun aspek individu dalam kehidupan kaum muslim, untuk kembali mengidentifikasi identitas mereka sebagai muslim sejati, tanpa ada pengaruh peradaban Barat.

Setelah kematian Hassan al-Banna pada tahun 1948, *Ikhwanul Muslimin* dilanjutkan oleh Sayyid Qutb. Di tangan Qutb inilah pemikiran ideologis *Ikhwanul Muslimin* dirumuskan secara sistematis. Baginya, Islam merupakan agama yang menjamin kebebasan manusia secara utuh, jika pengabdian hanya pada Allah. Dalam hal ini, pengabdian secara total, yang mana dalam segala aspek kehidupan manusia, seharusnya berpegang pada ajaran Islam yang diklaim sebagai satu-satunya kebenaran. Hal ini menandakan bahwa Islam sebagai pedoman hidup yang diciptakan Tuhan tidak membutuhkan sandaran yang berasal dari luar dirinya sendiri.⁵ Selain itu, Qutb sendiri berpendapat bahwa Al-Qur'an sesungguhnya telah menghimpun segala sesuatu yang dibutuhkan manusia.⁶ Dalam hal ini, ia menolak pandangan bahwa Islam harus belajar dari Barat mengenai pembangunan masyarakat dan politik, dan juga menentang adanya interaksi atau penyamaan antara nilai-nilai Islam dan Barat.

Ikhwanul Muslimin, dalam perkembangannya, mulai melontarkan istilah pengkafiran untuk menentang sistem pemerintahan negara-negara modern yang sudah berbaur dengan kebudayaan Barat, bahkan menganggap para penguasa dan

⁴ Mathias Daven, "Politik Atas Nama Allah" dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger (ed.), *Hidup sebuah Pertanyaan. Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero, op. cit.*, hlm. 99.

⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

⁶ Ahmad Sanusi, "Konsep Negara menurut Ikhwanul Muslimin", *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, 14:2 (Banten: Desember-Juli 2018), hlm. 15.

pengikutnya sebagai *jahiliyyah*.⁷ Seiring perkembangannya, Ideologi Islamisme tidak hanya sebatas pada lingkaran perjuangan kedua tokoh penting Islam Mesir, tapi juga secara perlahan-lahan mulai berkembang dan merambah ke negara-negara mayoritas Islam, termasuk Indonesia.

Masuknya ideologi Islamisme di Indonesia merupakan suatu tantangan tersendiri bagi realitas bangsa yang plural ini. Hal ini bermula dari masuknya *Ikhwanul Muslimin* melalui: *pertama*, lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi gerakan Tarbiyah, yang lama-kelamaan melahirkan sebuah partai, yakni Partai Keadilan Sejahtera; *kedua*, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan gagasan Pan-Islamismenya, yang berjuang menegakkan Khilafah Islamiyah di dunia, termasuk Indonesia; dan yang *ketiga*, Wahabi⁸ yang melakukan wahabisasi secara global (termasuk Indonesia).⁹

Pergerakan Islamisme yang terus merangsek masuk ke Indonesia terus menjadi ancaman, terutama ketika Kartosoewiryo mengusung ide Islam sebagai dasar negara. Hal ini juga telah melahirkan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan juga Negara Islam Indonesia (NII). Bagi Kartosoewiryo, negara Indonesia harus berlandaskan Islam. Namun Soekarno yang cenderung sekuler dengan tegas menolak gagasan tentang Islam sebagai dasar negara Indonesia.¹⁰ Hal ini juga telah melahirkan ketegangan antara Soekarno dan

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸ Wahabi adalah sebuah sekte keras dan kaku yakni pengikut Muhammad Ibn ‘Abdul Wahab. Ia lahir pada tahun 1703/1115 di ‘Uyaynah, termasuk daerah Najd, belahan timur kerajaan Saudi Arabia saat ini. Wahab secara harafiah dan ekstrem serta kaku, atas sumber-sumber ajaran Islam (Al-Qur’an dan Sunah Nabi). Serta juga menyebabkan dia menolak rasionalisme, tradisi dan beragam khazanah intelektual Islam yang sangat kaya. Pada tahun 1740/1153, Ibn ‘Abdul Wahab mendapat dukungan dari ‘Utsman ibn Mu’ammarr. Hal ini menjadi kekuatan bagi Wahab untuk bertindak lebih tegas terhadap orang-orang yang menyimpang dari konsep ajaran Islam menurut Wahab. Pada tahun 1746/1159, Wahabi dan Muhammad ibn Sa’ud (seorang politikus) yang adalah sekutu permanen yang membantu Wahab, keduanya memproklamasikan jihad terhadap siapapun yang mempunyai pemahaman tauhid berbeda dari mereka. Dari aliansi keduanya (Wahabi-sa’ud) panggung pemurtadan, pengkafiran dan aksi-aksi kekerasan dilakukan atas dasar aliansi tersebut. Gerakan tersebut dimulai dengan tuduhan *Syirk* (Polytheist), murtad dan kafir. Kepada kaum yang menyimpang, boleh dihadapi dengan kekerasan atau peperangan. Hal ini menjadi wajib dilakukan karena penyimpangan dari konsep ajaran Islam menurut Wahab. Selama lima belas tahun setelah proklamasi jihad, wahabi dan sekutunya Sa’ud berhasil menguasai sebagian besar jazirah Arab, hingga meninggalna Sa’ud pada tahun 1766/1180 dan Wahabi pada tahun 1791/1206. Abdurahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam. Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 62-69.

⁹ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁰ Dr. Mahmuddin, M. Ag, *Akar-akar dan Doktrin Ideologi Islamisme di Dunia Islam* (Makasar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uinalauddin Makassar, 2019), hlm. 89.

Kartosoewiryo, karena Soeharto menolak untuk memasukkan tujuh kata dalam piagam Jakarta, yang mana Kartosoewiryo, merumuskan suatu kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam dalam hidup bernegara.

Kemudian upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan syari'at Islam juga tidak terlepas dari gerakan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi ini didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab. FPI tumbuh menjadi organisasi garis keras Islamisme Indonesia yang cukup serius membayangi dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Dalam hal ini, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan FPI dinilai meresahkan masyarakat Indonesia termasuk sebagian golongan Islam sendiri. Hal ini melahirkan tuntutan-tuntutan atas organisasi FPI agar segera dibubarkan. FPI sendiri menjadi terkenal karena aksi-aksi kontroversialnya sejak 1998. Rangkaian aksi penutupan tempat-tempat pelacuran dan tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat maksiat, adanya ancaman dan bahkan penangkapan terhadap warga negara tertentu dan konflik dengan organisasi berbasis agama lain adalah wajah FPI yang paling sering ditampilkan dalam media massa.¹¹

Berdasarkan fakta-fakta di atas, di mana ideologi lahir dan berkembang hingga merangsek masuk ke Indonesia, penulis melihat bahwa paham-paham radikal seperti ideologi Islamisme terutama di Indonesia, mestinya ditempuh dengan membangun dialog terus-menerus dengan para petinggi agama dan tokoh-tokoh penting setiap ormas yang berbau agama. Memang di Indonesia, pemerintah sudah memberikan sanksi yuridis-politis, tapi usaha membedah pemikiran ideologis dalam Islamisme sangat penting. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini, penulis akan membahas upaya dalam membedah ideologi Islamisme di Indonesia, dengan bertolak dari konsep masyarakat terbuka Karl Raimund Popper.

Masyarakat terbuka dalam pandangan Karl Popper merupakan masyarakat demokratis yang terbuka pada kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang terkandung dalam kebenaran yang sudah diyakini. Dalam konsep masyarakat terbuka, politik bukan semata-mata tentang benar dan salahnya suatu oknum tertentu sebagaimana diyakini dalam ideologi Islamisme, tapi tentang baik dan

¹¹ Wikipedia.org, "*Front Pembela Islam*", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam., diakses pada 16 september 2022.

buruk, sehingga bisa dikompromikan secara bersama. Hal yang sama terjadi dengan ideologi Islamisme di Indonesia. Hal itu dibuat dengan aksi-aksi yang kontroversial, menampilkan wajah-wajah masyarakat tertutup, yang dengan pemahaman yang kaku dan ekstrem, membaca dan mempraktekkan ajarannya sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat disangkal. Oleh sebab itu, tulisan ini merupakan suatu kritik sekaligus jalan untuk membedah ideologi Islamisme di Indonesia, dengan berdasarkan pada konsep masyarakat terbuka Karl Popper, tulisan ini secara khusus diberi judul, “ISLAMISME DI INDONESIA SEBAGAI MUSUH MASYARAKAT TERBUKA DALAM PEMILKIRAN KARL POPPER.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang mau dibahas dalam tulisan ini ialah sejauh mana konsep Masyarakat Terbuka Karl Popper relevan terhadap usaha memerangi pemikiran ideologis dalam Islamisme di Indonesia. Masalah pokok ini, kemudian dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Bagaimana berkembangnya ideologi Islamisme dan pengaruhnya terhadap Masyarakat Terbuka di Indonesia?
2. Bagaimana konsep Masyarakat Terbuka menurut Karl Raimund Popper?
3. Bagaimana relevansi konsep Masyarakat Terbuka Karl Popper sebagai kritik terhadap ideologi Islamisme di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, skripsi ini memiliki dua tujuan utama, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. *Petama*, tujuan umum penulisan skripsi ini ialah hendak menelaah lebih dalam konsep masyarakat terbuka Karl Popper dan relevansinya sebagai sebuah kritik terhadap ideologi Islamisme di Indonesia. *Kedua*, tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis bagi penulis untuk meraih gelar Strata Satu (S1) di bidang Filsafat, pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam karya tulis ini adalah metode penelitian kepustakaan. Kemudian penulis akan menganalisis data yang diperoleh melalui

beberapa tahap berikut. *Pertama*, penulis mengumpulkan, membaca dan menganalisis data-data sekunder dari buku-buku, jurnal dan artikel. *Kedua*, penulis mendalami bahan bacaan yang sudah dikumpulkan secara pribadi dan kemudian, penulis mendiskusikannya dengan berbagai pihak untuk memperdalam pengetahuan penulis akan tema yang diangkat dalam karya ilmiah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima (5) bab. Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisikan tema tentang berkembangnya ideologi Islamisme dan pengaruhnya terhadap Masyarakat Terbuka di Indonesia. Bab III penulis akan membahas relevansi konsep Masyarakat Terbuka Karl Popper sebagai kritik terhadap ideologi Islamisme di Indonesia. Bab IV berisikan tema tentang Ideologi Islamisme di Indonesia sebagai musuh Masyarakat Terbuka. Bab V berisikan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan usul-saran.